



# RENJA 2023

Rencana Kerja  
Perangkat Daerah  
Tahun 2023



---

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

<http://perindag.babelprov.go.id>

---

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Renja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 ini menjadi dasar dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai, yang sesuai dengan cascading yang sudah selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya.

Pangkalpinang, April 2022

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



**Drs. H. TARMIN, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
B A B I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	5
1.4.Sistematika Penulisan Renja Dinas Perindustrian.....	6
B A B II.....	9
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU .....	9
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	43
2.3.Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	45
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	46
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	47
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	61
Tabel 2.5.1 Usulan Pokir DPRD Tahun 2023.....	62
Tabel 2.5.2 Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2023.....	62
Tabel 2.5.3 Usulan Bappeda Kabupaten/ Kota Tahun 2023.....	63
Tabel 2.5.4 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Pokok - Pokok Pikiran DPRD.....	65
Tabel 2.5.5 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Aspirasi Masyarakat.....	65
Tabel 2.5.6 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Bappeda Kabupaten/Kota	66
Tabel 2.5.7 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Inovasi.....	68
Tabel 2.5.8 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Pengarusutamaan Gender	69

Tabel T-C.32.....	71
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	71
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	71
B A B III.....	90
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	90
3.1.TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI .....	90
3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .....	91
3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN .....	91
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	93
B A B IV.....	111
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	111
4.1.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	111
BAB IV .....	116
PENUTUP.....	116
Lampiran RENJA 2023 – SIPD .....	117

## **B A B I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, khususnya dalam Urusan Perindustrian dan Perdagangan maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Renja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi menjalankan Urusan Perindustrian dan Perdagangan dalam membantu tugas Gubernur di bidang perindustrian dan perdagangan, sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan urusan pilihan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut telah ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 sebagai Perencanaan Kerja Jangka Menengah lima tahunan dan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 yang terukur jelas sebagai dukungan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2023, yang sesuai dengan cascading yang sudah selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Secara keseluruhan proses penyusunan Renja meliputi beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Perumusan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan Renja dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan perangkat daerah;
2. memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rancangan

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

3. merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RENSTRA perangkat daerah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah hingga tahun berkenaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yang mencakup rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah :

1. Terwujudnya pencapaian Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertera pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;
2. Menyelaraskan dan mensinergikan program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan program unggulan pembangunan prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah serta Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah pada RKPD 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perindustrian**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. LATAR BELAKANG**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

##### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

##### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;

##### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah  
Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja Utama yang sudah ditentukan dalam NSPK dan RPJMD serta Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
Berisikan uraian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD  
Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Memasukkan Usulan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, melalui proses akomodir dan tidaknya sesuai dengan strategi dan arah kebijakan program/kegiatan tahun berjalan.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  
Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

## B A B II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU

---

Dalam rangka memaksimalkan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka dilakukan reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu sampai dengan tahun 2022 dan hasil capaian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun berjalan sampai dengan periode Triwulan I Tahun Anggaran 2022 yang telah direalisasikan melalui penetapan program/kegiatan di dalamnya yang mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan mengakomodir program prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 27 (duapuluh tujuh) kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan pedoman tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 10 (sepuluh) Program, yang terdiri atas 1 (satu) program rutin dan 9 (sembilan) program pembangunan strategis.

Tabel berikut akan menyajikan rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)	80	Nilai	-	80	74,81	93,51	80	154,81	1,94
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Dokumen	-	18	18	100	11	29	1,71
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	-	11	11	100	11	22	2,20
Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	-	7	7	100	7	14	2,00
	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)	60	Nilai	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	60	Nilai	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen SPM	26	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen SPP	26	Dokumen	-	26	41	157,69	26	67	2,58
	Jumlah Dokumen Rekapitulasi Daftar Gaji dan Tunjangan	26	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Kelengkapan Gaji	26	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2800	Orang/Bulan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen pengujian/verifikasi	1350	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Penatausahaan pengeluaran	1350	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	38	Laporan	-	-	-	-	-	-	-

	/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	38	Laporan	-	28	28	100	28	56	1,47
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan	31	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	22	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	60	Nilai	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22	Dokumen	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Nilai	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	-	-	-	-	-	-

Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	-	12	12	100	12	24	24,00
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	-	12	12	100	12	24	2,00
Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Layanan Informasi dan Kehumasan PD	12	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan	24	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	-	12	12	100	12	24	2,00

Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	-	12	12	100	12	24	2,00
Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	-	12	12	100	-	12	6,00
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	-	12	12	100	12	24	2,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	47	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabil	Jumlah Gedung Kantor dan	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-

itiasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Tertib Usaha	100% %	-	-	-	-	70	70	70,00
Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perizinan	2 Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan B2 yang memiliki perizinan Perdagangan B2	2	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen/rekomendasi	2	Pelaku Usaha	-	-	-	3	3	1,50
Subkegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	2	Dokumen	-	-	-	-	-	0,00
Subkegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan	2		-	0	0	1	1	0,50

Pelabelan Bahan Berbahaya	Pelabelan Bahan Berbahaya									
Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase SKA dan Pelaku Ekspor yang terpantau	100%	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10	Dokumen	-				-	-	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Barang terdistribusi	82%	%	-	75	75	100	80	155	189,02
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana distribusi yang terkelola	47%	%	-	35	35	100	45	80	170,21
Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	26	Laporan	-	8	8	100	36	44	1,69
Subkegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	4	Orang	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,50%	%	-	9,2	9,2	100	9	18,2	214,12
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Penting	75%	%	-	70	70	100	-	70	93,33
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	Laporan	-	48	48	100	-	48	4,00
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	Laporan	-	48	48	100	-	48	4,00
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok	75%	%	-	70	70	100	65	135	180,00
Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	12	Laporan	-	48	48	100	48	96	8,00

Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota									
Subkegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12	Laporan	-	12	12	100	12	24	2,00
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	%	-	99,65	99,65	100	99,7	199,35	221,50
Subkegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	6	Laporan	-	4	4	100	4	8	1,33
Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6	Laporan	-	4	4	100	4	8	1,33
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	4%	%	-	2	89,16	4458	5	94,16	2354,00

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Komoditi/Produk Yang dipromosikan	2	Produk	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasiona 1	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	3	Produk	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Nilai Ekspor	12	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25	Pelaku Usaha	-	24	24	100	30	54	2,16
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	42	Nilai	-	40	42	105	42	84	2,00
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100%	%	-	100	100	100	100	200	200,00
Subkegiatan Pemberdayaan Konsumen dan	Jumlah Badan Penyelesaian	1	BPSK	-	-	-	-	-	-	-

Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif									
Subkegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2	LPKSM	-	-	-	-	-	-	
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	41	Pengaduan	-	-	-	-	-	-	
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	83%	%	-	78	78	100	82	160	192,77
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12	Laporan	-	12	12	100	12	24	2,00
Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	12	Kasus	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar	60%	%	-	0	0	-	60	60	100,00

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang dipromosikan	10	Produk	-	0	0	-	8	8	0,80
Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Promosi Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	10	UMKM	-	0	0	-	8	8	0,80
Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang dipasarkan	10	Produk	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10	UMKM	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk Lokal yang digunakan	10	Produk	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	10	Laporan	-	-	-	-	-	-	-

	Jumlah Pemahaman Generasi Muda dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri	25 Orang	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	25 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan akses pasar online	10 Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Jaringan Informasi Perdagangan	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	2,50% %	-	1	1	100	2	3	120,00
Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Sebaran Wilayah Industri	1 Dokumen	-				1	1	1,00
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	15 Dokumen	-	2	2	100	24	26	1,73

	Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan	51000	Orang	-	49.500	49.500	100	55.000	104.500	2,05
	Jumlah Sumberdaya Industri yang dibina	4	Dokumen	-	4	4	100	4	8	2,00
	Jumlah Pelaku Industri terbina dengan kategori baik	24	Dokumen	-	24	24	100	24	48	2,00
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8	Dokumen	-	2	2	100	16	18	2,25
	Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri	1	Dokumen	-	1	1	100	1	2	2,00
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8	Dokumen	-	2	2	100	7	9	1,13
	Nilai Investasi Industri Pengolahan Non-Migas (Rp. Triliun)	5,2	Nilai	-	4,857	4,857	100	5,462	10,319	1,98
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	Dokumen	-	2	2	100	4	6	1,00
	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penerapan dan evaluasi RPIP	2	Dokumen	-	2	2	100	4	6	3,00
Subkegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	12	Dokumen	-					-	0,00

Pembangunan Industri	Pembangunan Industri									
	Tersusunnya Risalah Naskah Penelitian Pertumbuhan Industri	2	Dokumen	-	1	1	100	4	5	2,50
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	60%	%	-	30	30	100	80	110	183,33
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	15	Dokumen	-	1	1	100		1	0,07
	Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Izin Perluasan Perusahaan Industri	5	Dokumen	-	1	1	100		1	0,20

	dan Kawasan Industri								
Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: Industri Besar; dan Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	20	Dokumen	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	50%	%	-	-	-	-	-	-

	Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang Diawasi	1	Laporan	-	1	1	100	1	2	2,00
	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang diawasi	50	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peserta Rakor Wasdal	80	Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bidang Perindustrian	80	Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peserta Rakor Industri Hijau	50	Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peserta Rakor Pengawasan Kawasan Industri	50	Orang	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peserta Rakor Pengembangan Hilirisasi Industri	80	Orang	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	2	Dokumen	-	1	1	100	1	2	1,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas	80%	%	-	-	-	-	-	-	-

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Laporan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peserta Bimtek	60	Orang	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peserta Diseminasi	50	Orang	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Publikasi Data SIINas	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang dipantau dan dievaluasi	50	Perusahaan	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-

dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB)	Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	77	Nilai	-	80	67,66	84,58	80	147,66	1,92
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (UPTD BPSMB)	60	Nilai	-	-	-		-	-	-
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	-	1	1	100	0	1	1,00
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	-	6	12	200	12	24	2,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan (UPTD BPSMB)	24	Unit	-	-	-		-	-	-

Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD BPSMB)	60	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	-	-	-	-	12	12	1,71
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	60	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-

Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	6	6	100	12	18	18,00
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	6	6	100	12	18	18,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD BPSMB)	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPSMB)	3 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	6	6	100	12	18	18,00

Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	-	6	6	100	12	18	18,00
Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD BPSMB)	20	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-

Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	-	-	-	-	-	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)	100%	%	-	70	70	100	75	145	145,00
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan dan pemeliharaan Ruang lingkup (UPTD BPSMB)	1		-	3	2	66,67	4	6	6,00
	Jumlah Laporan Pemeliharaan Ruang Lingkup	12	Laporan	-	-	-		-	-	-
	Jumlah Laporan Pemeliharaan Parameter Pengujian	12	Laporan	-	-	-		-	-	-
	Jumlah Laporan Penambahan Parameter Pengujian	12	Laporan	-	-	-		-	-	-
Subkegiatan Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	1	Komoditi	-	1	1	100	1	2	2,00
	Persentase sampel yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku	85%	%	-	-	-		-	-	-
	Jumlah sampel Lada yang diuji	200	Sample	-	340	299	87,94	175	474	2,37
	Jumlah sampel CPO yang diuji	30	Sample	-	2	2	100	31	33	1,10

	Jumlah sampel Pengujian Beras	45	Sample	-	19	19	100	45	64	1,42
Subkegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	275	Dokumen	-	361	320	88,64	255	575	2,09
	Persentase sampel yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku	100%	%	-	100	88,64	88,64	100	188,64	188,64
Subkegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1	Sertifikat	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase jumlah alat yang dikalibrasi	80%	%	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	5	Sertifikat	-	-	-	-	-	-	-
										-
										-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (RPK)	Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK)	40%	%	-	70	100	142,86	80	180	450,00
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi desain promosi dan atau media promosi	25	UMKM	-	16	34	212,5	-	34	1,36
Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	25	UMKM	-	15	32	213,33	-	32	1,28

Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi pemasaran	25	UMKM	-	1	2	200	48	50	2,00
Subkegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25	UMKM	-	-	-		24	24	0,96
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Peningkatan kelembagaan (UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan)	1	Laporan	-	-	-		-	-	-
Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	1	Laporan	-	-	-		-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK)	Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	77	Nilai	-	80	67,66	84,58	80	147,66	1,92
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (UPTD RPK)	60	Nilai	-	-	-		-	-	-

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	-	-	-	-	-	-	
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	-	6	6	100	12	18	1,50
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan (UPTD RPK)	14	Unit	-					-	-
Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	-	-	-		-	-	-
Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	-	-	-		-	-	-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD RPK)	60	Nilai	-	-	-		-	-	-
Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	-	-	-		-	-	-

Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD RPK)	60 Nilai	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	-	6	6	100	12	18	9,00
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	-	6	6	100	12	18	9,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD RPK)	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-

Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD RPK)	3 Paket	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	6	6	100	12	18	1,50

Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD RPK)	10	Unit	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	Unit	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Unit	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	Unit	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Unit	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Unit	-	-	-	-	-	-

dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi								
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPK)	Persentase Fasilitas Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang diproduksi (UPTD RPK)	60% %	-	70	100	142,86	80	180	300,00
Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Design dan produksi produk label/kemasan	12 Laporan	-	6	6	100	12	18	1,50
	Jumlah Laporan pengelolaan bahan baku, gudang, mesin dan peralatan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150 Dokumen	-	12	12	100	24	36	0,24

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tugas pokok yang dititik beratkan pada sasaran dan program strategisnya dengan indikator masing-masing. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tabel analisis dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	SPM/ Standar	IKK	TargetRenstraPerangkat Daerah					RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	INDIKATOR KINERJA UTAMA												
1	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan						14,250	14,500	14,170	17,925	14,500	15,250	
2	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan						11,500	11,750	11,583	12,666	11,750	12,250	
3	Nilai RB Perangkat Daerah						-	-	-	-	65	67	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
1	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok						9,20	9,00	9,74	2,25	9,00	5,90	
2	Tertib Usaha						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pertumbuhan nilai ekspor non migas						6,00	7,50	-8,70	106,95	7,50	4,00	
4	Inflasi Pangan Bergejolak						-	-	-	-	-	-	
5	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						78,00	100,00	59,00	78,00	100,00	83,00	
6	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku						70,00	75,00	96,52	87,94	75,00	85,00	
7	Persentase kinerja realisasi pupuk						99,65	99,70	99,65	99,65	99,70	90,00	
8	Persentase penanganan pengaduan konsumen						100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Pertumbuhan implementasi PLK (Pasar Lelang Komoditas)						-	-	-	-	-	10,00	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas						1,00	2,00	-5,64	5,44	2,00	2,50	
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas						62200	63500	58551	53181	63500	57000	
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB						19,00	20,00	18,76	20,86	20,00	21,00	
4	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)						1100	1200	1188	2672	1200	1300	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non-Migas (Rp. Triliun)						4,857	5,462	4,253	4,938	5,462	5,250	

### **2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2017 – 2022, beberapa isu – isu strategis yang diperkirakan masih berpengaruh terhadap aktivitas industri dan perdagangan Provinsi Bangka Belitung kedepan adalah:

#### **1. Masih rendahnya nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan**

Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan sektor industri yang pada tahun 2020 berdampak tumbuh negatif di -5,64 %, dan pada tahun 2021 tumbuh 5,44 %, namun masih menyisakan permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukkan industri
- b. Pengembangan Kawasan Industri Sadai masih dalam proses penjanjirngan investasi dan pengembangan kawasan
- c. Masih belum optimalnya tata kelola industri pengolahan
- d. Masih rendahnya pengembangan produk potensial ekspor
- e. Belum maksimalnya pemetaan potensi ekspor
- f. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri
- g. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas

#### **2. Masih rendahnya nilai Lapangan Usaha Perdagangan**

Pertumbuhan sektor perdagangan pum mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat terdampak pandemi di -4,62 % namun cukup mampu bangkit tumbuh di tahun 2021 sebesar 5,78 %, seiring meningkatnya permintaan ekspor terhadap komoditi yang berasal dari Bangka Belitung dan mengalami kenaikan harga komoditi yang cukup tinggi. Namun pada sektor perdagangan ini masih menyisakan permasalahan antara lain:

- a. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) ada yang masih bersifat individu/perorangan/petani langsung.

- b. Kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat.
- c. Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.
- d. Adanya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi dan terlambatnya distribusi pupuk.
- e. Belum maksimalnya tata kelola ekspor, pendataan ekspor, promosi dan peningkatan kapasitas SDM dan produk Ekspor
- f. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen.
- g. Lingkup Layanan pengujian dan sertifikasi yang masih sangat terbatas
- h. Belum Optimalnya pemasaran produk-produk lokal pada pasar lokal maupun luar daerah.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan data rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda dan Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN UPT				4.672.971.540					21.268.982.581	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				3.738.024.913					16.543.086.916	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.222.524.913	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.735.747.015	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	82	79.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Disperindag)	80	58.352.321	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	12	79.400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran	11	58.352.321	
								Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	11		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	5	75.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen (Renstra P, Renja, Renja P)	3	54.252.879	
								Jumlah dokumen (RKA, RKPA, DPA, DPPA)	4		
								Jumlah dokumen (TAPKIN, RAD/DO, PK, RKT)	4		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi kinerja PD	7	4.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan (LKJIP, LPPD)	2	4.099.442	
								Jumlah Laporan (LKPJ, DALEV)	5		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80	2.197.029.413	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	80	14.970.042.203	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan	26	12.782.933.564	
								Jumlah Laporan Keuangan PD	26		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	95		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen SPP	26	12.782.933.564	
			Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	20 orang/bulan				Jumlah Berkas Kelengkapan Gaji	78		
								Jumlah Berkas Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan	78		

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80	145.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12	145.232.450
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Berkas Laporan penggunaan komponen instalasi listrik bulanan	12	4.999.402
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis ATK yang dibeli	10	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah berkas laporan penggunaan ATK bulanan	12	23.259.110
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah berkas laporan penggunaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	12	16023244
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6 unit		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah berkas laporan penggunaan Bahan Logistik Kantor bulanan	12	2945664
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah barang cetak	50		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah berkas laporan penggunaan Barang Cetak dan Penggandaan bulanan	12	12269030
			Jumlah penggandaan	40000						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	109 eksemplar		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah berkas laporan penggunaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bulanan	12	1800000
	Penyediaan Bahan/Material									
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	450		Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah berkas laporan penggunaan makan minum tamu dan makan minum rapat bulanan	12	5375000
			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	516						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	7	125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah berkas laporan penggunaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bulanan	12	78.561.000
			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	77						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80	0					0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Paket						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80	1.986.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	1.979.609.303

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat/Barang yang dikirim	127	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah berkas administrasi surat menyurat	12	3.910.000	
			Jumlah Materai	952							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	134.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah berkas Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	128.399.303	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa Peralatan Kantor	1 Jasa							
			Jasa Perlengkapan Kantor	1 Jasa							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.847.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah berkas administrasi tenaga administrasi yang dipekerjakan	12	1.847.300.000	
			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	8				Jumlah berkas administrasi tenaga keamanan yang dipekerjakan	12		
			Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	9				Jumlah berkas administrasi tenaga kebersihan yang dipekerjakan	12		
			jumlah pramubakti	29				Jumlah berkas administrasi tenaga pramubakti yang dipekerjakan	12		
			Jumlah tenaga sopir	3				Jumlah berkas administrasi tenaga sopir yang dipekerjakan	12		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		survey kepuasan pelayanan umum (angka)	80	65.329.413	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Disperindag	12	62.266.886	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	4	28.468.312	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah berkas administrasi jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	28.385.888	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	2	36.861.101	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah berkas administrasi jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	28.809.698	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		jumlah berkas administrasi Pemeliharaan Aset Tetap Kantor Lainnya	12	4.510.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor yang terpelihara	1 Paket							

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	1 Paket		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah berkas Administrasi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	561.300	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya	1	41.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Tertib Usaha	70	19.269.987	
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	3	41.000.000	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	3	19.269.987	
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya		Jumlah Distributor/ Pengecer	3	20.500.000						
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Jumlah Produk bahan berbahaya	1	20.500.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Jumlah Produk bahan berbahaya	1	19.269.987	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Barang terdistribusi	0,65	209.700.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Barang terdistribusi	80	188.962.224	
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Komoditas yang dikelola (TON)	200	209.700.000	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Persentase sarana distribusi yang dikelola	45	188.962.224	
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah pengelolaan yang dibina (lokasi)	3	209.700.000	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	12	188.962.224	
		Jumlah Laporan Pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan					12				
		Jumlah Laporan Pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan					8				
		Jumlah Laporan Pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan					4				
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase ketersediaan Bapokting	0,85	185.300.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	9.00	176.791.529	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)	18	33.000.000					0	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok	8	33.000.000						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Penting	6							
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Koevisien Variasi	<11	152.300.000	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok	65	140.169.528	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Pemantauan harga dan stok	84	37.550.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah laporan daftar harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha	48	33.536.728	
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Operasi Pasar	14	114.750.000	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar di Kabupaten/Kota	12	106.632.800	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	0,75	39.595.500						
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	11	39.595.500	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Persentase kinerja realisasi pupuk	99,7	36.622.001	
	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi		Jumlah Pemeriksaan (dokumen)	11							
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengawasan (laporan)	2	21.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah laporan hasil Pengawasan Pengadaan Pupuk subsidi dan Pestisida	4	19.668.595	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		Jumlah Pengawasan (laporan)	11	18.595.500	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		Jumlah laporan hasil pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk subsidi	4	16.953.406	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		Jumlah Pengawasan (laporan)	2							
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)	1000	235.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase pertumbuhan nilai ekspor	5	107.380.464	

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Akses Pasar Ekspor	3	120.000.000					0	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Produk Siap Ekspor yang dipamerkan	2							
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Permintaan Produk Dagang	6	120.000.000						
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah SDM perdagangan yang terlatih	45	115.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Nilai Ekspor (USD Juta)	1200	107.380.464		
					Jumlah Laporan Data Informasi dan Statistik Ekspor	12			
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksporir/Calon Eksporir	45	115.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha di kab/kota yang mendapat pembinaan	30	107.380.464		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	42 (Mampu)	170.500.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	42 (Mampu)	157.678.052		
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk	3	20.500.000				0		
Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang beroperasi	3	20.500.000						
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumen yang teredukasi	440	80.000.000	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	94.615.336		
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Responden	400	40.000.000	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	12	37.919.399		
					Jumlah berkas pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	12			
				Peningkatan hubungan kerja dengan Lembaga perlindungan konsumen	Jumlah laporan koordinasi dengan Lembaga perlindungan konsumen	5	19.977.328		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)	40	40.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen	Jumlah Laporan Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen	12	36.718.609		
					Jumlah Laporan Penanganan dan penyelesaian sengketa	12			

							konsumen dalam aplikasi SIMPKTN				
							Jumlah berkas Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen	12			
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	1	70.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	82	63.062.716		
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Jenis Barang yang diawasi	11	70.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah Laporan pengawasan barang beredar dan jasa	12	63.062.716		
						Jumlah Laporan pengawasan barang beredar dan jasa dalam aplikasi SIMPKTN	12				
						Jumlah berkas pengawasan barang beredar dan jasa	12				
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	0,6	65.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	60	57.270.235		
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Permintaan Dagang	4	65.000.000	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Jumlah produk lokal yang dipromosikan	8	57.270.235		
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang	8	65.000.000	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang	8	57.270.235		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			515.500.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				807.339.901		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	0,03	400.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pertumbuhan unit usaha industri	2	725.599.340		
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	0,02	400.000.000	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah Sarana dan prasarana Kawasan industri	1	725.599.340		
						Jumlah sebaran wilayah industri	1				
						Jumlah Sumberdaya industri yang dibina	4				
						Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	55000				
						Nilai Investasi industri pengolahan non migas (triliun Rp)	5.462				
	Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan penerapan dan evaluasi RPIP	4									

							Jumlah pelaku industri terbina dengan kategori baik	24			
							Tersusunnya risalah naskah penelitian pertumbuhan industri	4			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM OVOP yang dibina	26			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Laporan perkembangan pembangunan Kawasan industri	4	76.921.583		
							Laporan perkembangan sentra industri	4			
							Laporan perkembangan standarisasi sentra industri	4			
							Laporan perkembangan penerapan standarisasi industri didalam Kawasan	4			
							Laporan perkembangan industri OVOP	4			
							Laporan perkembangan standarisasi industri OVOP	4			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI	200			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Laporan Sumberdaya Industri	4	174.651.461		
							Laporan Standarisasi Produk Industri	4			
							Laporan Peningkatan kemampuan SDM industri	4			
							Laporan pengembangan industri berbasis sumber daya alam	4			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	2								
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda	350	400.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Laporan tenaga kerja kreatif	4	474.026.296		
		Jumlah SDM Industri yang terlatih	80								
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	0,8	115.500.000		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	35	81.740.561		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yg dipantau	55	115.500.000		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah IUI yg diawasi	1	81.740.561		
							Jumlah Usaha industri dalam penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI yang dipantau	20			
							Jumlah Usaha industri yang diawasi	20			
							Jumlah Usaha industri yang dibina	1			

							Laporan Analisa usaha industri	12			
							Laporan pemantauan usaha industri	2			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau	5	32.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah laporan pembinaan dan penyelamatan industri	1	26.810.450		
							Jumlah komitmen usaha industry dalam penerbitan IUI, IUPI, IUKI dan IPKI yang dipantau	1			
							Jumlah Berita Acara Verifikasi Teknis penerbitan perizinan industry besar	1			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah IUI yang diawasi	50	83.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi		Jumlah laporan pengawasan industri	1	54.930.111		
							Jumlah data kapasitas produksi dan produksi perusahaan industri	1			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri di SIINAS	0,9	0					0		
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap	1	0					0		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25								
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG			551.746.627	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				470.871.671		
	Bidang PERDAGANGAN			551.746.627	Bidang PERDAGANGAN				470.871.671		
	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80	321.746.627	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	80	251.638.591		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80	0					0		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah berkas kegiatan administrasi kepegawaian UPTD BPSMB	4	9.785.000		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	18		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	12	9.785.000		

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Umum	80	144.700.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan kegiatan administrasi umum UPTD BPSMB	12	97.330.354		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah laporan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	999.157		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	19.700.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	4.998.725		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah barang cetak	2 eksemplar		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah laporan cetak dan penggandaan barang	12	9.161.972		
		Jumlah penggandaan	30000 lembar									
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	125 eksemplar								
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	200 Pax		Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	12.595.500		
		Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia										
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	63	125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah laporan koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah	12	69.575.000		
		Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	149									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Umum	80	0					0		
	Pengadaan Mebel		Jumlah meubeler yang disediakan	1 Paket								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang tersedia	1 Paket								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Umum	80	147.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah berkas jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah UPTD BPSMB	12	110.687.303		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat/Barang yang dikirim	33	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa Surat menyurat	12	13.079.458		
		Jumlah Materai	110									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12	142.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	97.607.845		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Umum	80	30.046.627	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah UPTD BPSMB	12	33.835.934		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3	30.046.627	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Laporan administrasi jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	30.036.184		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang tersedia	2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	3.799.750		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor yang dipelihara	1								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1								
Program STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Layanan Terstandarisasi	1	230.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	75	219.233.080		
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi	0,95	230.000.000	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penambahan dan pengembangan ruang lingkup (UPTD BPSMB)	4	219.233.080		
							Jumlah Sampel yang diuji	250			
							Jumlah Layanan sertifikasi dan Jasa LS Pro (UPTD BPSMB)	2			
							Jumlah Peralatan yang dikalibrasi	10			
Verifikasi Mutu Produk		Jumlah komoditi yang di verifikasi	4	90.000.000	Verifikasi Mutu Produk		Jumlah Ruang lingkup pengujian pada laboratorium pengujian (Lada)	1	77.418.180		
							Jumlah Ruang lingkup laboratorium pengujian (Beras)	1			
							Jumlah Penambahan dan Pengembangan Ruanglingkup pengujian (CPO, Kalibrasi dan Logam)	2			
Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Sample yang di uji	250	70.000.000	Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Sampel lada yang di uji	40	141.814.900		
							Jumlah Sampel lada yang di uji	43			
							Jumlah Sampel lada yang di uji	45			

							Jumlah Sampel lada yang di uji	47			
							Jumlah Sampel CPO yang di uji	15			
							Jumlah Sampel CPO yang di uji	16			
							Jumlah Sampel pengujian Beras	14			
							Jumlah Sampel pengujian Beras	15			
							Jumlah Sampel pengujian Beras	16			
							Jumlah Contoh lada, cpo dan beras yang diambil	250			
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Alat yang dikalibrasi	10	70.000.000							
	UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN			383.200.000	UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN				4.255.023.994		
	Bidang PERDAGANGAN			50.000.000	Bidang PERDAGANGAN				181.758.364		
	Program PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	0,6	50.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk IKM yang dipasarkan	80	181.758.364		
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang Siap dipasarkan	20	50.000.000	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk IKM yang terfasilitasi promosi dan pemasaran (UPTD RPK)	48	181.758.364		
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Produk	20	50.000.000	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Lokal	8	181.758.364		
	Bidang PERINDUSTRIAN			333.200.000	Bidang PERINDUSTRIAN				4.073.265.630		
	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80	223.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Promosi dan Kemasan	80	260.102.170		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	80	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan UPTD RPK	12	43.187.855		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan (BKU dan SPJ Fungsional)	12	43.187.855		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80	0					0		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	4								

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Umum	80	137.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum UPTD RPK	12	125.001.327		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah laporan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	2.999.705		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	13.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	21.084.553		
						Penyediaan Peralatan Rumah tangga		jumlah laporan ketersediaan peralatan rumah tangga	12	7.131.329		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		jumlah barang cetak	5 Eksemplar		Penyediaan Barang cetak dan penggandaan		Jumlah laporan cetak dan penggandaan barang	12	12.899.849		
			Jumlah penggandaan	1000 lembar								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12 eksemplar								
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	12 pax		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	5.300.000		
			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	80 pax								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	10	123.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah	12	75.585.891		
			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	24								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Umum	80	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah berkas jenis barang milik daerah yang diadakan UPTD RPK	1	4.999.772		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah peralatan kantor yang tersedia	2 jenis		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Laporan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12	4.999.772		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Survey Kepuasan Pelayanan Umum	80	86.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah berkas jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah UPTD RPK	12	80.913.216		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat/Barang yang dikirim	73	8.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	3.513.929		
			Jumlah Materai	200								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel,	12	77.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	77.399.287		

		virtual meeting yang dibayarkan									
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Umum	80	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah UPTD RPK	12	6.000.000			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	6.000.000			
	Program PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	0,05	110.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kemasan Produk IKM yang diproduksi	80	3.813.163.460			
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	0,02	110.000.000	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Laporan Produk yang difasilitasi	12	3.813.163.460			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Produk	200	110.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Laporan produksi kemasan produk	12	3.813.163.460			
Jumlah laporan desain kemasan produk						12					

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan perindustrian dan bidang perdagangan Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi dan bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat umum.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukantahapan forum/rapat koordinasi teknis Perangkat Daerah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi Zoom Meeting. Segala usulan program/kegiatan dari Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Usulan Masyarakat dan usulan SKPD Kabupaten /Kota dapat disampaikan dan dibahas melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain dalam kegiatan Forum Gabungan/ Rakortek/ Forum Konsultasi Publik/ Pramusrenbang/ Musrenbang. Adapun usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan yang menjadi bahan pembahasan Renja tahun 2023, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

- o Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pokir DPRD, Masyarakat dan Bappeda Kab/Kota

Tabel 2.5.1 Usulan Pokir DPRD Tahun 2023

No.	Pengusul	Usulan Permasalahan	Volume/ Satuan	Lokasi	Status		Alasan
					Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	AMRI CAHYADI, ST Fraksi PPP	Kurangnya Fasilitasi dan Promosi Pelaku Usaha Ekspor Bantuan dan usaha promosi yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang, sehingga dipandang penting untuk meningkat aspek ini	1 paket	Kab. Bangka Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan/Desa	✓		
2	YOGA NURSIWAN, A.Md Fraksi Partai Golkar	Kurangnya Fasilitasi dan Promosi Pelaku Usaha Ekspor Supaya difasilitasi untuk mempromosikan hasil UMKM untuk di jual keluar daerah	1 paket	Kelurahan Pangkallalang, Kab. Belitung Kecamatan Tanjung Pandan Kelurahan Pangkallalang	✓		

Tabel 2.5.2 Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2023

No.	Pengusul	Usulan Permasalahan	Volume/ Satuan	Lokasi	Status		Alasan
					Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	...						Tidak ada usulan

Tabel 2.5.3 Usulan Bappeda Kabupaten/ Kota Tahun 2023

No.	Pengusul	Usulan Permasalahan	Volume/ Satuan	Lokasi	Status		Alasan
					Diakomodir	Tidak Diakomodir	
1	BAPPEDA Kab. Bangka Selatan	Tidak tepat sasaran dalam Penyaluran Pupuk Peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida masih belum optimal	1 paket	Kab. Bangka Selatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan/Desa	✓		
2	BAPPEDA Kab. Bangka Selatan	kurangnya fasilitasi Layanan Pengujian, Standarisasi dan Kalibrasi Fasilitas pelayanan tera/tera ulang seperti tempat pengujian dan tempat penyimpanan peralatan belum memenuhi standar	1 paket	Kab. Bangka Selatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan/Desa		✓	urusan kemetrologian kewenangan Kab/Kota
3	BAPPEDA Kab. Bangka Selatan	kurangnya fasilitasi Layanan Pengujian, Standarisasi dan Kalibrasi Terdapat peralatan standar minimal yang belum dimiliki	1 paket	Kab. Bangka Selatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan/Desa		✓	urusan kemetrologian kewenangan Kab/Kota
4	BAPPEDA Kab. Bangka Selatan	kurangnya fasilitasi Layanan Pengujian, Standarisasi dan Kalibrasi Ruang lingkup pengujian masih terbatas karena keterbatasan alat dan kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan	1 paket	Kab. Bangka Selatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan/Desa		✓	urusan kemetrologian kewenangan Kab/Kota
5	BAPPEDA Kab. Bangka Selatan	Kurangnya fasilitas Distribusi Barang Komoditas Unggulan Daerah Kegiatan promosi dagang yang masih terbatas	1 paket	Kab. Bangka Selatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan/Desa	✓		

6	BAPPEDA Kab. Bangka Selatan	Kurangnya fasilitas Distribusi Barang Komoditas Unggulan Daerah Kemasan produk yang masih perlu di tingkatkan	1 paket	Kab. Bangka Selatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan/Desa	✓		
7	BAPPEDA Kab. Bangka Selatan	Kurangnya Fasilitasi dan Promosi Pelaku Usaha Ekspor Kegiatan pameran dan promosi produk yang berpotensi ekspor masih sangat terbatas	1 paket	Kab. Bangka Selatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan/Desa	✓		
8	BAPPEDA Kab. Bangka Selatan	Tidak Lengkapnya Dokumen Perizinan Distributor/Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Kurangnya koordinasi dari perusahaan kebidang perizinan sehingga dokumen yang perlu dilengkapi tidak / belum memenuhi persyaratan	1 paket	Kab. Bangka Selatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kelurahan/Desa		✓	BPOM dan Dinkes

- o Verifikasi Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pokir DPRD, Masyarakat dan Bappeda Kab/Kota

Tabel 2.5.4 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Pokok - Pokok Pikiran DPRD

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	4,00%	Rp 2.050.000.000	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Komoditi/Produk Yang dipromosikan	2	Rp 1.700.000.000	
		Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	2	Rp 735.000.000	2 pikir pada sub kegiatan yang sama

Tabel 2.5.5 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Aspirasi Masyarakat

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan ...	Program ...				
		Kegiatan ...				
		Subkegiatan ...				

Tabel 2.5.6 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Bappeda Kabupaten/Kota

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,50%	Rp 1.042.000.000	
		Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk	90,00%	Rp 241.000.000	
		Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6	Rp 129.000.000	Pengawasan penyaluran pupuk
2	Urusan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	4,00%	Rp 2.050.000.000	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Komoditi/Produk Yang dipromosikan	2	Rp 1.700.000.000	
		Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	2	Rp 735.000.000	2 usulan pada sub kegiatan yang sama

3	Urusan Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPK)		60%	Rp 3.500.000.000	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Design dan produksi produk label/kemasan	12	Rp 3.500.000.000	
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150	Rp 3.500.000.000	

- o Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inovasi dan Pengarusutamaan Gender

Tabel 2.5.7 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Inovasi

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,50%	Rp 1.042.000.000	
		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Penting	75%	Rp 368.000.000	
		Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	Rp 251.000.000	Sistem Informasi Harga/Barang Kebutuhan Pokok
2	Urusan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (RPK)	Prosentase Barang terdistribusi	40%	Rp 438.000.000	
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pengembangan kelembagaan (UPTD RPK)	1	Rp 200.000.000	
		Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	1	Rp 200.000.000	Sistem Elektronik Pengembangan Kantor (Sierpeka)

Tabel 2.5.8 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Pengarusutamaan Gender

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Urusan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	4,00%	Rp 2.050.000.000	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Komoditi/Produk Yang dipromosikan	2	Rp 1.700.000.000	
		Subkegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25	Rp 350.000.000	
2		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (RPK)	Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK)	40%	Rp 438.000.000	
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi desain promosi dan atau media promosi	25	Rp 190.000.000	
		Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	25	Rp 190.000.000	
3	Urusan Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	2,50%	Rp 5.025.000.000	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Sebaran Wilayah Industri	1	Rp 5.025.000.000	

		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8	Rp 1.500.000.000	
4	Urusan Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	2,50%	Rp 5.025.000.000	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Sebaran Wilayah Industri	1	Rp 5.025.000.000	
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	Rp 2.500.000.000	
5	Urusan Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (UPTD RPK)	Persentase Fasilitasi Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang diproduksi (UPTD RPK)	60%	Rp 3.500.000.000	
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (UPTD RPK)	Jumlah Laporan Fasilitas Design dan produksi produk label/kemasan	12	Rp 3.500.000.000	
		Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (UPTD RPK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150	Rp 3.500.000.000	

Tabel T-C.32.  
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)	80 Nilai	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)	60 Nilai	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	60 Nilai	
			Jumlah Dokumen SPM	26 Dokumen	
			Jumlah Dokumen SPP	26 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Rekapitulasi Daftar Gaji dan Tunjangan	26 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Gaji	26 Dokumen	
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2800 Orang/Bulan	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700 Dokumen	
			Jumlah Dokumen pengujian/verifikasi	1350 Dokumen	

			Jumlah Dokumen Penatausahaan pengeluaran	1350	Dokumen	
	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700	Dokumen	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dokumen	
	Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dokumen	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38	Laporan	
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38	Laporan	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan	31	Unit	
	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	
	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	22	Dokumen	
	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	
	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	
	Subkegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	60	Nilai	

	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22	Dokumen	
	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Nilai	
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	
	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	
	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24	Dokumen	
	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	
			Jumlah Laporan Layanan Informasi dan Kehumasan PD	12	Laporan	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan	24	Unit	

	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	
	Subkegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	Unit	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Paket	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	47	Unit	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Tertib Usaha	100%	%
	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perizinan	2	Pelaku Usaha
	Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen
	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha perdagangan B2 yang memiliki perizinan Perdagangan B2	2	Pelaku Usaha
	Subkegiatan Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen
	Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen/rekomendasi	2	Pelaku Usaha
	Subkegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya		Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	2	Dokumen
	Subkegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	2	
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Persentase SKA dan Pelaku Ekspor yang terpantau	100%	Dokumen

	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10	Dokumen	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Prosentase Barang terdistribusi	82%	%	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Persentase sarana distribusi yang terkelola	47%	%	
	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1	Unit	
	Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	26	Laporan	
	Subkegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	4	Orang	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	8,50%	%	
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Penting	75%	%	
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	Laporan	
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	Laporan	
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok	75%	%	
	Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	Laporan	
	Subkegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	12	Laporan	

			yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	%
	Subkegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	6	Laporan
	Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6	Laporan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	4%	%
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah Komoditi/Produk Yang dipromosikan	2	Produk
	Subkegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4	Pelaku Usaha
	Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	Pelaku Usaha
	Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	3	Produk
			Jumlah Laporan Nilai Ekspor	12	Laporan
	Subkegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25	Pelaku Usaha
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	42	Nilai
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan pengaduan konsumen	100%	%
	Subkegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1	BPSK
	Subkegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2	LPKSM

	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen		Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	41	Pengaduan	
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	83%	%	
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12	Laporan	
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah Kasus yang Ditangani	12	Kasus	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar	60%	%	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Jumlah produk lokal yang dipromosikan	10	Produk	
	Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah UMKM yang Melakukan Promosi Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	10	UMKM	
	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk lokal yang dipasarkan	10	Produk	
	Subkegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10	UMKM	
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk Lokal yang digunakan	10	Produk	
	Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	10	Laporan	
			Jumlah Pemahaman Generasi Muda dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri	25	Orang	

	Subkegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Laporan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	25	Laporan	
			Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan akses pasar online	10	Pelaku Usaha	
	Subkegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Jaringan Informasi Perdagangan	10	Dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah Sebaran Wilayah Industri	1	Dokumen	
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	15	Dokumen	
			Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan	51000	Orang	
			Jumlah Sumberdaya Industri yang dibina	4	Dokumen	
			Jumlah Pelaku Industri terbina dengan kategori baik	24	Dokumen	
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8	Dokumen	
			Jumlah Sarana Prasarana Kawasan Industri	1	Dokumen	
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8	Dokumen	
			Nilai Investasi Industri Pengolahan Non-Migas (Rp. Triliun)	5,2 T	Nilai	
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	6	Dokumen	

			Industri dan Peran Serta Masyarakat		
			Jumlah dokumen perencanaan dan laporan penerapan dan evaluasi RPIP	2	Dokumen
	Subkegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12	Dokumen
			Tersusunnya Risalah Naskah Penelitian Pertumbuhan Industri	2	Dokumen
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	60%	%
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang diterbitkan	1	Laporan
			Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	15	Dokumen
			Jumlah Dokumen Berita Acara Verifikasi Teknis Izin Perluasan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	5	Dokumen
	Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:	20	Dokumen

			Industri Besar; dan Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
			Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	50%	%
			Jumlah Laporan Perusahaan Industri yang Diawasi	1	Laporan
			Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang diawasi	50	Dokumen
			Jumlah Peserta Rakor Wasdal	80	Orang
			Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bidang Perindustrian	80	Orang
			Jumlah Peserta Rakor Industri Hijau	50	Orang
			Jumlah Peserta Rakor Pengawasan Kawasan Industri	50	Orang
			Jumlah Peserta Rakor Pengembangan Hilirisasi Industri	80	Orang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	2	Dokumen
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas	80%	%
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem	1	Laporan

			Informasi Industri Nasional (SIINas)		
			Jumlah Peserta Bimtek	60	Orang
	Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	Dokumen
			Jumlah Peserta Diseminasi	50	Orang
			Jumlah Dokumen Publikasi Data SIINas	2	Dokumen
	Subkegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	2	Dokumen
			Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang dipantau dan dievaluasi	50	Perusahaan
	Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2	Dokumen
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB)		Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	77	Nilai
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (UPTD BPSMB)	60	Nilai
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12	Laporan

			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan (UPTD BPSMB)	24	Unit
	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen
	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD BPSMB)	60	
	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	60	
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket
	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD BPSMB)	4	Unit	
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	
Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	
Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPSMB)	3	Paket	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD BPSMB)	20	Unit	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	Unit	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	6	Unit	

			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (BPSMB)		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)	100%	%
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penambahan dan pemeliharaan Ruang lingkup (UPTD BPSMB)	1	
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Ruang Lingkup	12	Laporan
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Parameter Pengujian	12	Laporan
			Jumlah Laporan Penambahan Parameter Pengujian	12	Laporan
	Subkegiatan Verifikasi Mutu Produk		Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	1	Komoditi
			Persentase sampel yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku	85%	%
			Jumlah sampel Lada yang diuji	200	Sample
			Jumlah sampel CPO yang diuji	30	Sample
			Jumlah sampel Pengujian Beras	45	Sample
	Subkegiatan Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	275	Dokumen
			Persentase sampel yang diuji sesuai ketentuan yang berlaku	100%	%
	Subkegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi		Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1	Sertifikat
			Persentase jumlah alat yang dikalibrasi	80%	%
	Subkegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi		Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	5	Sertifikat
	UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (RPK)		Persentase Fasilitasi Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK)	40%	%
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang terfasilitasi desain promosi dan atau media promosi	25	UMKM

	Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	25	UMKM	
	Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang terfasilitasi pemasaran	25	UMKM	
	Subkegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25	UMKM	
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Laporan Pengembangan kelembagaan (UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan)	1	Laporan	
	Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	1	Laporan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK)		Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	77	Nilai	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (UPTD RPK)	60	Nilai	
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan Peraturan (UPTD RPK)	14	Unit	
Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	
Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD RPK)	60	Nilai	
Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	
Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD RPK)	60	Nilai	
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	
Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	
Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	
Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	
Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Laporan	
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD RPK)	4	Unit	

	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	
	Subkegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	Unit	
	Subkegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Paket	
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	
	Subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	
	Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	
	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD RPK)	3	Paket	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD RPK)	10	Unit	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	Unit	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Unit	

	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	Unit	
	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Unit	
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPK)</b>					
			Persentase Fasilitasi Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang diproduksi (UPTD RPK)	60%	%	
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah Laporan Fasilitas Design dan produksi produk label/kemasan	12	Laporan	
			Jumlah Laporan pengelolaan bahan baku, gudang, mesin dan peralatan	12	Laporan	
	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150	Dokumen	

## B A B III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

---

#### 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah Kebijakan Industri Nasional dalam jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. Sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

1. Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional
2. IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar
3. Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam)
4. Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar
5. Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan
6. Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC.

Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa strategic outcomes yang terdiri dari:

1. Meningkatnya nilai tambah industri
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
4. Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan
5. Memperkuat dan lengkapnya struktur industri
6. Meningkatnya persebaran pembangunan industri, serta
7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu *“Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing ”*.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi;
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Dari Tujuan diatas akan dicapai dengan 2 (dua) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan
2. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan
3. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan 2 (dua) Urusan Pilihan, yaitu: Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 dan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D).

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
  1. Penyesuaian terhadap Permendagri 90 tahun 2019
  2. Penyesuaian terhadap Kepmendagri 050-5889
  3. Strategi dan Arah Kebijakan RPD 2023-2026
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
  1. Terdapat 10 Program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2023
  2. Terdapat 27 Kegiatan yang masing-masing mendukung program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
  3. Terdapat 60 Sub Kegiatan yang masing-masing mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
  4. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan di Provinsi dan 7 Kab/Kota

Lebih jelas rencana program dan kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.33 di bawah ini :

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023 (Tahun Rencana)											
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
							<b>24.185.314.196</b>	<b>1.461.137.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.646.451.665</b>			
Organisasi: 3.30.3.31.0.00.1..0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							21.869.351.189	1.113.742.496	0	0	22.983.093.685			
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			20.215.856.179	1.113.742.496	0	0	21.329.598.675		
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)	80	Nilai	142.933.380	0	0	0	142.933.380	
3	30	1	1.01		Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Dokumen	142.933.380	0	0	0	142.933.380	
3	30	1	1.01	1	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	97.933.580					PAD
3	30	1	1.01	7	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	44.999.800					PAD
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)	60	Nilai	18.377.134.783	1.057.698.578	0	0	19.434.833.361	
3	30	1	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Daerah	60	Nilai	15.040.781.358	0	0	0	15.040.781.358	
3	30	1	1.02	1	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2800	Orang/ Bulan	15.019.801.458					PAD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700	Dokumen						
						Jumlah Dokumen pengujian/verifikasi	1350	Dokumen						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan pengeluaran	1350	Dokumen						

3	30	1	1.02	6	Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dokumen	3.999.300						PAD
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38	Laporan							
3	30	1	1.02	7	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38	Laporan	16.980.600						PAD
3	30	1	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	60	Nilai	198.018.720	0	0	0	198.018.720		
3	30	1	1.05	2	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	98.018.720						PAD
3	30	1	1.05	9	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	100.000.000						PAD
3	30	1	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Nilai	459.930.500	0	0	0	459.930.500		
3	30	1	1.06	1	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	14.989.000						PAD
3	30	1	1.06	2	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	74.998.800						PAD
3	30	1	1.06	3	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	19.946.700						PAD
3	30	1	1.06	4	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	9.996.400						PAD
3	30	1	1.06	5	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	49.999.600						PAD
3	30	1	1.06	8	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	50.000.000						PAD

3	30	1	1.06	9	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	240.000.000						PAD
3	30	1	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan	24	Unit	2.321.700	1.057.698.578	0	0	1.060.020.278		
3	30	1	1.07	1	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit		482.286.000					PAD
3	30	1	1.07	5	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket		23.747.400					PAD
3	30	1	1.07	6	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	Unit	2.321.700	551.665.178					PAD
3	30	1	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Paket	2.238.080.505	0	0	0	2.238.080.505		
3	30	1	1.08	1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	10.000.000						PAD
3	30	1	1.08	2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	149.890.205						PAD
3	30	1	1.08	3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	4.690.300						PAD
3	30	1	1.08	4	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.073.500.000						PAD
3	30	1	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	47	Unit	438.002.000	0	0	0	438.002.000		
3	30	1	1.09	1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	56.800.000						PAD
3	30	1	1.09	2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	107.524.000						PAD

3	30	1	1.09	6	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	23.750.000					PAD
3	30	1	1.09	9	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	99.928.000					PAD
3	30	1	1.09	11	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000					PAD
3	30	2			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase Tertib Usaha</b>	1	%	131.974.500	0	0	0	131.974.500	
3	30	2	1.01		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki perizinan	2	Pelaku Usaha	11.999.700	0	0	0	11.999.700	
3	30	2	1.01	1	Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	11.999.700					PAD
3	30	2	1.02		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha perdagangan B2 yang memiliki perizinan Perdagangan B2	2	Pelaku Usaha	8.987.200	0	0	0	8.987.200	
3	30	2	1.02	1	Subkegiatan Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	8.987.200					PAD

3	30	2	1.03		Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi komitmen/rekomendasi	2	Pelaku Usaha	19.998.000	0	0	0	19.998.000	
3	30	2	1.03	2	Subkegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	2	Dokumen	8.998.000					PAD
3	30	2	1.03	3	Subkegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi,	2	Dokumen	11.000.000					PAD
3	30	2	1.04		Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase SKA dan Pelaku Ekspor yang terpantau	1	Dokumen	90.989.600	0	0	0	90.989.600	
3	30	2	1.04	1	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	12	Dokumen	90.989.600					PAD
3	30	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Prosentase Barang terdistribusi	0,82	%	337.918.166	56.043.918	0	0	393.962.084	
3	30	3	1.01		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana distribusi yang terkelola	0,47	%	337.918.166	56.043.918	0	0	393.962.084	
3	30	3	1.01	1	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1	Unit	122.585.926	56.043.918				PAD
3	30	3	1.01	2	Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	26	Laporan	159.852.462					PAD
3	30	3	1.01	3	Subkegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	4	Orang	55.479.778					PAD

3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	0,085	%	219.200.000	0	0	0	219.200.000	
3	30	4	1.01		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Penting	0,75	%	89.200.000	0	0	0	89.200.000	
3	30	4	1.01	1	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	Laporan	66.000.000					PAD
3	30	4	1.01	2	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12	Laporan	23.200.000					PAD
3	30	4	1.02		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok	0,75	%	39.000.000	0	0	0	39.000.000	
3	30	4	1.02	1	Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	Laporan	31.000.000					PAD
3	30	4	1.02	2	Subkegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12	Laporan	8.000.000					PAD
3	30	4	1.03		Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,9	%	91.000.000	0	0	0	91.000.000	



3	30	6	1.01	1	Subkegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1	BPSK	113.500.000							PAD
3	30	6	1.01	2	Subkegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2	LPKSM	17.499.700							PAD
3	30	6	1.01	3	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	41	Pengaduan	46.000.000							PAD
3	30	6	1.03		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,83	%	123.498.800	0	0	0	123.498.800			
3	30	6	1.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12	Laporan	100.499.200							PAD
3	30	6	1.03	2	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	12	Kasus	22.999.600							PAD
3	30	7			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar	0,6	%	299.997.950	0	0	0	299.997.950			
3	30	7	1.01		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang dipromosikan	10	Produk	140.000.000	0	0	0	140.000.000			
3	30	7	1.01	1	Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Promosi Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	10	UMKM	140.000.000							PAD
3	30	7	1.02		Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang dipasarkan	10	Produk	47.000.100	0	0	0	47.000.100			

3	30	7	1.02	1	Subkegiatan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10	UMKM	47.000.100						PAD
3	30	7	1.03		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk Lokal yang digunakan	10	Produk	112.997.850	0	0	0	112.997.850		
3	30	7	1.03	1	Subkegiatan Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	10	Laporan	41.500.100						PAD
						Jumlah Pemahaman Generasi Muda dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri	25	Orang							
3	30	7	1.03	2	Subkegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	25	Laporan	43.498.225						PAD
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan akses pasar online	10	Pelaku Usaha							
3	30	7	1.03	3	Subkegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Jaringan Informasi Perdagangan	10	Dokumen	27.999.525						PAD
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.653.495.010	0	0	0	1.653.495.010		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	0,025	%	1.178.997.610	0	0	0	1.178.997.610		
3	31	2	1.01		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Sebaran Wilayah Industri		Dokumen	1.178.997.610	0	0	0	1.178.997.610		
3	31	2	1.01	2	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	15	Dokumen	103.999.710						PAD





3	31	3	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	2	Dokumen	277.499.700						PAD
3	31	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas	0,8	%	140.997.700	0	0	0	140.997.700		
3	31	4	1.01		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Laporan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Laporan	140.997.700	0	0	0	140.997.700		
						Jumlah Peserta Bimtek	60	Orang							
3	31	4	1.01	1	Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	Dokumen	44.999.200						PAD
						Jumlah Peserta Diseminasi	50	Orang							
						Jumlah Dokumen Publikasi Data SIINas	2	Dokumen							
3	31	4	1.01	2	Subkegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	2	Dokumen	51.499.700						PAD
						Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang dipantau dan dievaluasi	50	Perusahaan							
3	31	4	1.01	3	Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2	Dokumen	44.498.800						PAD

Organisasi: 3.30.3.31.0.00.1..0001 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG								846.132.783	111.246.073	0	0	957.378.856		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			846.132.783	111.246.073	0	0	957.378.856		
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB)	Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	77	Nilai	457.146.775	34.656.073	0	0	491.802.848	
3	30	1	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD BPSMB)	24	Unit	46.000.000	0	0	0	46.000.000	
3	30	1	1.05	2	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40	stel	26.000.000				-	PAD
3	30	1	1.05	9	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	20.000.000				-	PAD
3	30	1	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	60		122.969.706	0	0	0	122.969.706	
3	30	1	1.06	1	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4.997.780					PAD
3	30	1	1.06	2	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.991.872					PAD
3	30	1	1.06	3	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.990.802					PAD
3	30	1	1.06	4	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.999.375					PAD
3	30	1	1.06	5	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	11.999.877					PAD
3	30	1	1.06	8	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	9.990.000					PAD
3	30	1	1.06	9	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	80.000.000					PAD
3	30	1	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD BPSMB)	4	Unit	0	34.656.073	0	0	34.656.073	

3	30	1	1.07	6	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit		34.656.073			35.000.000	PAD
3	30	1	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPSMB)	3	Paket	141.479.010	0	0	0	141.479.010	
3	30	1	1.08	1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	21.479.394					PAD
3	30	1	1.08	2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	119.999.616					PAD
3	30	1	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD BPSMB)	20	Unit	146.698.059	0	0	0	146.698.059	
3	30	1	1.09	2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	39.649.659					PAD
3	30	1	1.09	6	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	8.924.400					PAD
3	30	1	1.09	9	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	84.537.600					PAD
3	30	1	1.09	11	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	13.586.400					PAD
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	30	6			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)	1	%	388.986.008	76.590.000	0	0	465.576.008	
3	30	6	1.02		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan dan pemeliharaan Ruang lingkup (UPTD BPSMB)	1		388.986.008	76.590.000	0	0	465.576.008	
						Jumlah Laporan Pemeliharaan Ruang Lingkup	12	Laporan						



3	30	7	1.02	1	Subkegiatan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25	UMKM	41.999.629						PAD
3	30	7	1.03		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pengembangan kelembagaan (UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan)	1	Laporan	56.815.780	85.181.400	0	0	141.997.180		
3	30	7	1.03	1	Subkegiatan Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	1	Laporan	56.815.780	85.181.400					PAD
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.245.015.315	150.967.500	0	0	1.395.982.815		
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK)	Indeks Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	77	Nilai	361.389.815	81.596.500	0	0	442.986.315		
3	31	1	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan (UPTD RPK)	60	Nilai	25.550.000	0	0	0	25.550.000		
3	31	1	1.02	7	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	25.550.000						PAD
3	31	1	1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (UPTD RPK)	60	Nilai	68.447.620	0	0	0	68.447.620		
3	31	1	1.05	2	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	21.449.620						PAD
3	31	1	1.05	9	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	46.998.000						PAD
3	31	1	1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD RPK)	60	Nilai	159.362.400	2.628.900	0	0	161.991.300		

3	31	1	1.06	1	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.897.000							PAD
3	31	1	1.06	2	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	25.970.800	2.628.900						PAD
3	31	1	1.06	3	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	10.395.100							PAD
3	31	1	1.06	4	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	10.399.900							PAD
3	31	1	1.06	5	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	16.899.600							PAD
3	31	1	1.06	8	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Laporan	7.800.000							PAD
3	31	1	1.06	9	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	84.000.000							PAD
3	31	1	1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPTD RPK)	4	Unit	1.032.400	78.967.600	0	0			80.000.000	
3	31	1	1.07	6	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	1.032.400	78.967.600						PAD
3	31	1	1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD RPK)	3	Paket	86.998.395	0	0	0			86.998.395	
3	31	1	1.08	1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	4.000.000							PAD
3	31	1	1.08	2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	77.999.795							PAD
3	31	1	1.08	3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	4.998.600							PAD
3	31	1	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (UPTD RPK)	10	Unit	19.999.000	0	0	0			19.999.000	
3	31	1	1.09	6	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	19.999.000							PAD

3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPK)	Persentase Fasilitasi Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang diproduksi (UPTD RPK)		0,6 %	883.625.500	69.371.000	0	0	952.996.500	
3	31	2	1.01		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Design dan produksi produk label/kemasan		12 Laporan	883.625.500	69.371.000	0	0	952.996.500	
						Jumlah Laporan pengelolaan bahan baku, gudang, mesin dan peralatan		12 Laporan						
3	31	2	1.01	5	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		150 Dokumen	883.625.500	69.371.000				PAD

## B A B IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sasaran utama dalam meningkatkan profesionalitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya kompetensi aparatur serta meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur. Untuk mencapai kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dilaksanakan dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Program yang ditetapkan merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berubah kembali menjadi 9 (sembilan) dan program teknis 1 (satu) program rutin, dengan total kebutuhan dana sebesar:

**Tabel 4.1.1 Kebutuhan Pendanaan Unit Organisasi Tahun 2023**

ORGANISASI/PD/UPTD	RENCANA TAHUN 2023 (Tahun Rencana)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31.275.006.803	31.345.937.248
UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1.408.500.000	1.437.500.000
UPTD Rumah Promosi dan Kemasan	8.156.800.000	3.528.640.000
Total	40.840.306.803	36.312.077.248

Dengan rincian sebagai berikut:

## Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2023

### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, dengan 4 indikator:

- Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)
  - Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Disperindag)
  - Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
  - Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan
- yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (BPSMB)
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (BPSMB)
- Administrasi Umum Perangkat Daerah (BPSMB)
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPSMB)
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSMB)
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSMB)
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RPK)
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RPK)
- Administrasi Umum Perangkat Daerah (RPK)
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RPK)
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPK)
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPK)

### 2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 2 indikator:

- Persentase Tertib Usaha

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
- Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
- Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
- Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

### 3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- o Persentase Barang terdistribusi

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

### 4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- o Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
- Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

### 5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- o Persentase Pertumbuhan nilai ekspor

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi

#### 6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, dengan 2 indikator:

- o Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen
- o Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota
- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB)
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

#### 7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, dengan 2 indikator:

- o Jumlah Produk Lokal yang digunakan dan dipasarkan
- o Persentase Produk IKM yang dipasarkan (UPTD RPK)

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)
- Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)
- Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)

#### 8. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, dengan 2 indikator:

- o Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri
- o Persentase Kemasan Produk IKM yang diproduksi (UPTD RPK)

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

- Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (UPTD RPK)

#### 9. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- o Prosentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Penerbitan Usaha Industri (IUI), Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

#### 10. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan 1 indikator:

- o Prosentase data informasi industri di SIINas

yang akan dicapai melalui kegiatan:

- Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersaji pada:

#### Lampiran RENJA 2023 - SIPD

- ✓ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja DINAS
- ✓ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja BPSMB
- ✓ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja RPK

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam strategi dan arah kebijakan RPD 2023-2026 secara efektif dan efisien. Di samping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan 2022;
- Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 dan 2022;
- Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai;
- Memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2023 – 2026.

Demikianlah Renja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2023.

## Lampiran RENJA 2023 – SIPD

- ✓ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja DINAS
- ✓ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja BPSMB
- ✓ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja RPK
- ✓ SK Tim Renja 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439 093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439 093

email : [perindag@babelprov.go.id](mailto:perindag@babelprov.go.id)